

**TEKANAN KONGLOMERAT MEDIA TERHADAP OTONOMI  
INDIVIDUAL PARA PRAKTISI**

**(Kasus Keberpihakan Pada Kandidat Melalui Pemberitaan TV One,  
ANTV dan Metro TV, Selama Masa Pencalonan  
Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014)**

**Yuliyanto Budi Setiawan**

**(youleewa2n@gmail.com)**

**Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang**

**Abstract**

*Mass media can be called as a company. If media owner want construction of production result as his/her want, so that the out put will suitable with that construction. Creativity from worker will be limited for they work situation under pressure, intervention and rule that bind from top management. That individual autonomy media crews who work in news department in some television company are pressured. They have degradation in their work for the owner has agenda where the agenda is published by media. This is looked from publication Golkar Party when the party do competition of the leader party period 2009-2014. Some television company such as TV One, ANTV and MetroTV.*

**Keywords:** *Mass media, under pressure, degradation, owner*

**Pendahuluan**

Stasiun Televisi TV One, ANTV dan Metro TV beberapa waktu yang lalu, pernah melakukan peliputan berita selama masa perebutan 'kursi' Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2009-2014. Kelihatannya pernyataan tersebut sekilas tidak ada permasalahan, namun ketiga televisi swasta nasional itu tidak berimbang selama meliput pencalonan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Leo Batubara, salah satu praktisi media dari Dewan Pers, melihat Metro TV lebih fokus memberitakan sosok Surya Paloh, sedangkan TV One dan ANTV lebih condong ke Ical (Aburizal Bakrie), padahal

ada dua kandidat lain yang juga bertarung di 'kursi panas' yaitu Hutomo 'Tommy Soeharto' Mandala Putra dan Yuddy Chrisnandi. Leo menyesalkan tiap kandidat tidak diberi porsi peliputan yang setara atau berimbang (*balance*).

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja, juga mempertanyakan kebijakan pemberitaan yang diambil stasiun-stasiun tersebut, dimana cenderung memihak salah satu kandidat ([http://rol.republika.co.id/berita/79487/kpi\\_imbau\\_tv\\_tv\\_netral\\_siapkan\\_kandidat\\_munas\\_golkar](http://rol.republika.co.id/berita/79487/kpi_imbau_tv_tv_netral_siapkan_kandidat_munas_golkar)). Dalam rangka menarik simpati

pemirsa televisi sebelum Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang digelar pada bulan Oktober 2009, berdasarkan pengamatan penulis, pemberitaan TV One dan ANTV bahkan menonjolkan sisi-sisi yang baik dari Ical dan ‘menjatuhkan’ lawan politiknya (Surya Paloh). Hal senada juga dilakukan oleh Metro TV yang *intensive* ke Surya Paloh. Mengapa fenomena media ini bisa terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa ketiga stasiun televisi itu memiliki keterkaitan yang erat dengan mereka yang bertarung di Munas tersebut. TV One serta ANTV dimiliki oleh Ical dan berada dalam sub kelompok bisnis Bakrie Group, sementara *owner*-nya Metro TV yang juga berambisi jadi ketua umum, tidak lain yaitu Surya Paloh.

Sementara itu, era reformasi saat ini secara konseptual seharusnya memberikan ‘udara’ kebebasan bagi otonomi individual para praktisi media dalam berkreasi dan berkerja sesuai naluri jurnalisnya, namun mereka mengalami kendala ketika ingin menjalankan praktek jurnalisisme secara obyektif/netral, selama ada campur tangan *media owner* yang menginginkan segala macam kepentingannya (kepentingan bidang politik, ekonomi, budaya dan sebagainya) diberitakan di medianya. Bila pada masa Orde Baru, sesuatu yang menghantui otonomi individu para praktisi yaitu SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) yang dikeluarkan pemerintah, namun hantu itu saat ini berupa intervensi para konglomerat media pada bagian *news room*.

Media massa dapat diibaratkan sebagai suatu pabrik. Bila pemilik pabrik menginginkan rancangan hasil produksi sesuai keinginannya, maka *output*-nya akan sesuai dengan rancangan tersebut. Kreativitas pekerja akan terbatas, selama situasi kerja mereka masih dibawah tekanan,

intervensi dan aturan yang mengikat dari *top management*. Bila pernyataan tersebut dikaitkan dengan fokus permasalahan di tulisan ini, maka *individual autonomy* para praktisi media yang bekerja di bagian pemberitaan Stasiun Televisi TV One, ANTV serta Metro TV tertekan dan terdegradasi, selama *owner*-nya punya agenda, dimana agenda ini di *publish* lewat medianya.

Penulis pernah mengikuti pemberitaan TV One dan Metro TV di malam pengumuman Ketua Umum Partai Golkar, dimana kedua stasiun ini dari sore hari sampai menjelang shubuh secara *non stop* meliput *event* tersebut dan terlihat memomorduakan informasi yang lain. Sementara itu, adanya perlakuan peliputan yang berbeda ketika ada *event* serupa tetapi partainya berbeda, yaitu Pemilihan Ketua Umum Partai PAN. TV One dan Metro TV tidak meliput secara *non stop event* tersebut, namun hanya seperlunya saja. ‘Perseteruan pemberitaan’ antara TV One dan Metro TV kelihatan tidak pernah ada habisnya. Selain topik dalam makalah, kedua televisi ini pernah beradu informasi mengenai kasus Lumpur Lapindo.

Metro TV mempertontonkan secara eksklusif deskripsi bagaimana penderitaan korban Lumpur Lapindo meratapi nasibnya akibat bencana lumpur tersebut melalui tayangan Kick Andy, sementara TV One ‘membalasnya’ melalui Kabar Malam, dimana Lapindo Brantas (sub kelompok usaha Bakrie Group) diilustrasikan memberitakan ganti rugi ke para korban dan Reporter TV One juga mewawancarai para korban, yang merasa bahagia telah mendapatkan rumah layak dan penghidupan yang baik. TV One dan ANTV cenderung menyatakan musibah ini sebagai Lumpur Sidoarjo, sedangkan televisi lain dengan

nama Lumpur Lapindo (<http://old.nabble.com/Re:%28Tv-one-vs-metro-tv%29pertarungan-dalam-golkar1-td25671828.html>). Apakah itu suatu kebetulan, sesuatu yang disengaja atau ada *hidden agenda* dari para konglomerat media, khalayak (pemirsa) yang berpikir kritis pasti bisa menilainya.

Pemilik media demi memuluskan kepentingannya, dapat dengan seenaknya membuat berita, padahal media massa memiliki kekuatan didalam menggiring cara berpikir, persepsi, sikap dan perilaku masyarakatnya. Apa yang menjadi agenda media dengan berita-beritanya, akan menjadi agenda pembicaraan masyarakat pula. Kondisi ini dalam kajian komunikasi massa dikenal dengan istilah *agenda setting* (Nurudin, 2008: 53). Kalau agenda media fokus mendukung salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar, maka agenda diskusi publik juga tidak jauh berbeda dari tema tersebut.

Sementara itu, untuk para jurnalis media yang *owner*-nya melakukan intervensi, mereka terkesan dibatasi ruang geraknya dan manut dengan peraturan, kalau mereka melawan *top management*, mungkin bisa terkena sanksi perusahaan, bahkan sampai pada tahap pemecatan (sanksi ekonomi). Fenomena media ini sesuai dengan pernyataannya A. David Gordon di buku '*Controversies In Media Ethics*' (Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 51), bahwa kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik media menentukan keputusan-keputusan etis yang diambil oleh setiap individu atau praktisi media. Gordon menuturkan tekanan ekonomi sengaja diciptakan oleh konglomerat media dan jajaran *top management* untuk mempengaruhi *individual autonomy* pekerjaannya, sehingga jurnalis berkurang

kebebasannya didalam membuat keputusan etis jurnalistik.

Perusahaan, menurut Gordon, hanya fokus mencari keuntungan semata. Pemikiran A. David Gordon ini kontra dengan pendapat Carol Reuss. Reuss berargumen bahwa nilai-nilai individual dari para praktisi media sebagai dasar pengambilan keputusan etis mereka selama menjalankan profesi jurnalistik. Reuss menekankan isi media itu etis atau tidak, diketahui dari sikap yang diambil pekerja media tersebut (Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 45-46). Untuk penjelasan lebih lanjut tentang dua pemikiran ini ada dalam sub bab pembahasan.

Berdasarkan pada sub bab latar belakang di atas, dapat ditarik penafsiran bahwa tekanan pemilik media (stasiun Televisi TV ONE, ANTV dan METRO TV) dapat mempengaruhi *individual autonomy* para praktisi media tersebut, didalam mengambil keputusan-keputusan etis, ketika memberitakan Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar untuk masa bakti 2009-2014, beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana deskripsi fenomena media ini bila dikaitkan secara konseptual dengan perspektif etika media, seperti etika deontologi, etika teleologi dan etika keutamaan?

### Otonomi Jurnalis

Kreativitas dan *individual autonomy* para praktisi media yang bekerja di bagian *news room* stasiun televisi TV One, ANTV serta Metro TV akan terbatas dan terdegradasi, jika kondisi kerja mereka berada dibawah intervensi dan aturan yang mengikat dari *top management*. Mereka terkesan manut dengan peraturan

perusahaan, kalau mereka melawan konglomerat media, mungkin terkena sanksi yang bisa berujung pada pemecatan. Fenomena kehidupan media ini searah dengan pemikirannya A. David Gordon, bahwa kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik disekitar media, sebagai penentu keputusan-keputusan etis yang diambil setiap praktisi media. Gordon mengilustrasikan kalau tekanan pemerintah dan politik jauh lebih mempengaruhi sikap pekerja daripada nilai yang mereka yakini.

Kerangka etis yang dimiliki pekerja ditempatkan perusahaan pada posisi kedua. Kebebasan bagi organisasi merupakan sesuatu yang asing, dikarenakan konsentrasi utama *corporate* mencari keuntungan. Melalui cara melayani kepentingan pengiklan dan konsumen media. Penekanan otonomi individual ini biasanya justru dilakukan oleh organisasi media skala medium sampai besar, sementara pekerja menerima kondisi ini apa adanya, selama kebutuhan ekonomi mereka mendapat jaminan *corporate* tetap *survive* dan atau malah semakin meningkat. Pekerja media seperti ini menganut paham *pragmatism* (Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 51-56).

Gordon juga memperlihatkan hasil studi Warren Breed (1955) di *The New York Times Newspaper* (Breed dalam Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 54), bahwa tekanan ekonomi *corporate* mempengaruhi dinamika internal individu-individu di *news room*. Bila pernyataan Gordon tentang pragmatis tersebut dikaitkan dengan fokus masalah di tulisan ini, maka individu-individu yang mengabdikan di *news room* stasiun televisi TV One, ANTV dan Metro TV bersikap pragmatis. Mereka patuh dengan arahan dan intervensi *owner*-nya, sepanjang jaminan ekonomi pekerja terus

tercukupi.

Sementara itu, kerangka berpikirnya A. David Gordon di atas berseberangan dengan pemaparannya Carol Reuss. Reuss berpendapat bahwa nilai-nilai individual yang melekat di *media practitioners* dijadikan mereka sebagai rujukan pengambilan keputusan etis, ketika mempraktekkan profesi jurnalistiknya. Reuss menegaskan isi media itu dinilai etis atau bahkan dinilai sebaliknya oleh konsumen media, dapat diketahui dari hasil keputusan dan sikap yang ditunjukkan pekerja media tersebut. Reuss menyampaikan opininya David H. Weaver dan G. Cleveland Wilhoit, kalau para jurnalis diindikasikan memiliki nilai-nilai (*value*) otonomi, dimana nilai tersebut sulit dijumpai (bukan berarti tidak ada) di organisasi-organisasi media berskala nasional yang memiliki kompleksitas susunan keorganisasian dan ketergantungan terhadap teknologi.

Bagi jurnalis yang memegang teguh *value autonomy*, mereka akan memilih keluar dari media dan mencari pekerjaan lagi, bila kebebasan dan otonominya berada dalam bahaya berupa adanya tekanan konglomerat media (Weaver dan Wilhoit dalam Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 47-48). Langkah ini mereka ambil dalam rangka memperjuangkan idealisme, meskipun harus kehilangan pendapatan yang besar di media tersebut.

Reuss menambahkan dampak dari otonomi jurnalis (*autonomy journalists*) menghasilkan dua keuntungan. Pertama, adanya kesempatan bagi jurnalis untuk bekerja secara bebas/*independent*. Kedua, bukti jurnalis memperjuangkan kredibilitasnya, melalui kebebasan beraktivitas, berorganisasi dan berideologi.

Para praktisi media selama melakukan peliputan berita, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan (*freedom*), kebenaran (*truth*), netralitas (*objective*) dan keadilan (*justice*). Jurnalis dan media harus bersikap bebas dan terbuka (nilai *freedom*), ketika mempertimbangkan segala pandangan publik (positif maupun negatif) yang masuk ke media tersebut.

Lalu, nilai *truth-telling* berarti para jurnalis harus selalu berusaha menghasilkan berita-berita yang akurat, komprehensif dan bebas bias. Selain itu, nilai netralitas (*objective*) berkaitan dengan fakta, selama pers memberitakan suatu peristiwa, dimana jangan sampai subyektivitas wartawan masuk ke dalam materi berita. Untuk nilai keadilan (*justice*) mengandung pengertian bahwa para pekerja media seharusnya berkata jujur dan bersikap adil, sungguh-sungguh melakukan investigasi, dimana informasi yang diperoleh dan interpretasi atas informasi tersebut, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber (Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 48).

Selain pernyataannya Carol Reuss, Edmund B. Lambeth juga menegaskan adanya lima prinsip yang mendeskripsikan etika jurnalistik (*ethical journalists*), diantaranya: *truth telling*, *justice*, *freedom*, *humaneness* (praktek jurnalis berdasarkan prinsip kemanusiaan) dan *stewardship* (menjaga komitmen akan pentingnya otonomi individual jurnalis). Etika, kompetensi dan komitmen sebaiknya selalu ada dalam setiap pekerjaan jurnalis, agar tidak terjadi interpretasi yang salah atas informasi yang diperoleh praktisi media dari narasumbernya (Lambeth dalam Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 48).

Ada pemikir lain bernama John C. Merrill yang mengomentari pendapatnya A.

David Gordon dan Carol Reuss tentang '*individual autonomy and ethical decisions*'. Merrill sependapat dengan David Gordon bahwa keputusan-keputusan etis pekerja dipengaruhi oleh kekuatan yang beroperasi disekitar media, seperti: kekuatan pemodal atau konglomerat media, politik, budaya, ekonomi dan sosial. Merrill juga menilai opininya Reuss menarik (*not naive*), sepanjang nilai-nilai etika jurnalistik tidak hanya melekat secara individual dalam diri insan pers, tetapi juga berlaku bagi *media group members*.

Sementara itu, menurut Kovach dan Rosenstiel (2004: 233-235), ada sebuah prinsip yang seharusnya dipahami oleh pekerja media mengenai pekerjaan mereka dan kita sebagai konsumen ketika memilih media, yaitu wartawan atau praktisi media mempunyai kewajiban terhadap nuraninya. Setiap praktisi media mulai dari redaksi hingga dewan direksi, seharusnya memiliki rasa etika dan tanggungjawab personal (sebuah perpaduan moral). Terlebih lagi, mereka mempunyai tanggungjawab untuk menyuarakan hati nuraninya dan mempersuasi pihak lain untuk melakukan hal yang serupa.

Agar hal ini bisa terwujud, keterbukaan redaksi di *news room* merupakan faktor penentu. Halangan menjalankan profesi jurnalistik, menyulitkan jurnalis memproduksi berita yang akurat, adil, berimbang, berfokus pada publik, berpikiran independen dan berani. Wartawan perlu merasa bebas, bahkan tersemangati untuk angkat suara, "*Ide ini terlihat rasis bagiku,*" atau "*Bos, Anda membuat keputusan yang salah.*" Kondisi ini dapat terjadi bila adanya atmosfer terbuka di *news room* tanpa intervensi dari konglomerat media, sehingga semua individu-individu mampu menghasilkan berita secara akurat.

Intinya, mereka yang mengabdikan diri di organisasi harus dihargai perbedaan pandangannya dengan redaktur, pemilik, pengiklan, konsumen media dan otoritas mapan (pemerintah), jika kejujuran dan akurasi mengharuskan jurnalis berbuat begitu dengan *top management*. Selain itu, Kovach dan Rosenstiel juga menambahkan kalau Carol Marin pernah berbicara ke *Committee of Concerned Journalists Chicago*, “*Saya seorang wartawan yang meyakini kebenaran. Ketika suasana kerja menekan profesi jurnalis, Saya siap meninggalkan pekerjaan ini demi keyakinan tersebut.*”

### **Etika Media**

Oleh karena itu, perlunya kesanggupan dari para pemilik untuk membangun sebuah budaya media yang menjaga dan menghargai tanggungjawab pribadi pekerjaannya. Bila pemaparannya Kovach dan Rosenstiel tersebut dikaitkan dengan fokus permasalahan didalam *paper* ini, maka tidak adanya atmosfer keterbukaan dan independensi di *news room* stasiun televisi TV One, ANTV dan Metro TV, terbukti dengan adanya intervensi *owner*-nya yang memiliki agenda politik (pencalonan Aburizal Bakrie ataupun Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2009-2014). Mereka setuju dengan intervensi tersebut dan membuat berita sesuai arahan konglomerat media. Disamping itu, penulis dapat mempersepsikan juga bahwa pemilik TV One, ANTV dan Metro TV belum membangun budaya yang mampu menjaga dan menghargai independensi pribadi para pekerjaannya. Fenomena media di Indonesia ini dapat pula dikaji dengan menggunakan tiga perspektif etika media, seperti etika

deontologi, etika teleologi dan etika keutamaan. Penjelasannya sebagai berikut:

### **Perspektif Etika Teleologi;**

Sebelum menjelaskan perspektif etika ini, kita perlu mengetahui makna dari etika itu sendiri. Etika berarti pemberian norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa saja yang harus kita lakukan atau tidak boleh dilakukan (Bertens, 2007: 7–8). Setelah mengetahui pengertian etika, pembahasan berlanjut ke etika teleologi. Hedonisme merupakan salah satu cabang etis dari perspektif etika teleologi. “*Apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia?*” Lalu, para hedonis menjawab faktor kesenanganlah (*hedone*) yang memuaskan keinginan kita. Pemikir hedonis (Aristippos (433-355 SM), menyatakan manusia sejak masa kecil tertarik terhadap kesenangan, bila telah tercapai, ia tidak mencari yang lain. Kesenangan itu bersifat badani dan materi. Kesenangan, lanjut Aristippos, berupa kesenangan aktual, bukan kesenangan dari masa lampau dan kesenangan di masa mendatang. Selain itu, pemikir hedonis lainnya yaitu Epikuros (341-270 SM). Epikuros berkata kesenangan rohani hanyalah bentuk yang diperhalus dari kesenangan badani. Epikuros menyampaikan istilah yang ia sebut sebagai *ataraxia*. Manusia akan mencapai *ataraxia*, jika manusia memiliki ketenangan jiwa atau keadaan jiwa seimbang yang tidak membiarkan dirinya terganggu oleh hal-hal lain (Bertens, 2007: 235–241).

Aliran hedonisme ini juga mempengaruhi filsafat moral Inggris. Filsuf Inggris, John Locke (1632-1704) berkata, “*Kita sebut baik apa yang menyebabkan*

atau meningkatkan kesenangan; sebaliknya, kita namakan jahat apa yang dapat mengakibatkan atau meningkatkan ketidaksenangan dalam diri kita” (Dent dan Sons dalam Bertens, 2007: 241). Hedonisme termasuk ‘etika implisit’ dan mengandung nilai-nilai *egoisme* yang mungkin tanpa disadari, dianut oleh banyak individu pada saat ini. Bila etika hedonisme dikaitkan dengan problematika di makalah ini, maka individu-individu yang bekerja di stasiun televisi TV One, ANTV dan Metro TV, bersikap egois dikarenakan hanya memperhatikan kepentingan diri saja. Selama kebutuhan finansial pekerja terpenuhi, sehingga membuat mereka diam, maka mereka manut saja ketika ada intervensi *owner* media yang memiliki agenda politik.

Sementara itu, eudemonisme merupakan cabang etika lainnya dari perspektif etika teleologi. Filsuf besar Yunani yang juga Pemikir Eudemonisme, yaitu Aristoteles (384-322 SM) menegaskan bahwa setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan. Bisa dikatakan, dalam setiap perbuatan bertujuan mencapai sesuatu yang baik bagi dirinya. Berdasarkan opininya Aristoteles, semua orang mengejar tujuan tertinggi dihidupnya berupa kebahagiaan (*eudaimonia*). Kebahagiaan ini diperoleh kalau dia menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan seorang jurnalis selama meliput berita, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan (*freedom*), kebenaran (*truth*), netralitas (*objective*) dan keadilan (*justice*) (Gordon, Kittross, Reuss dan Merrill, 1996: 48). Sang jurnalis dikonsepsikan memperoleh kebahagiaan selama tujuan profesinya tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, lanjut Aristoteles, manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalnya. Kegiatan-kegiatan rasional tersebut dijalankan dengan disertai

keutamaan.

Ada dua macam keutamaan, antara lain: keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual menyempurnakan langsung rasionya, sementara keutamaan moral itu memberikan kesempatan bagi kita, ketika ingin menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari (Aristoteles dalam Bertens, 2007: 242-244). Dalam hal ini, keutamaan merupakan keseimbangan antara ‘kurang’ dengan ‘terlalu banyak.’ Misalnya, keberanian bersikap seharusnya ditunjukkan oleh praktisi media untuk menolak intervensi dari pemiliknya, selama mereka mempraktekkan profesi jurnalistiknya. Keberanian merupakan deskripsi dari cara bersikap yang baik, karena menunjukkan keutamaan dengan memilih jalan tengah diantara sikap gegabah dan sikap pemborosan. Keutamaan yang menentukan prinsip jalan tengah itu oleh Aristoteles disebut dengan istilah *phronesis* (kebijaksanaan praktis).

Selain hedonisme dan eudemonisme, adapula aliran utilitarisme klasik yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena di *paper* ini. Filosof David Hume (1711-1776) memberikan sumbangsih yang penting terhadap aliran ini. Bentuk lebih matang berasal dari idenya Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham meninggalkan hedonisme individualistis dan egoistis, dimana menekankan kalau kebahagiaan itu menyangkut seluruh umat manusia. Keputusan etis berupa moralitas merupakan suatu tindakan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Bentham menyampaikan *the principle of utility* yaitu *the greatest happiness of the greatest number* (prinsip kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar).

Prinsip kegunaan tersebut ditetapkan secara kuantitatif, dikarenakan kualitas kesenangan selalu sama. Satu-satunya yang bisa membedakannya ialah kuantitasnya. Bukan saja *the greatest number*, tapi juga *the greatest happiness* dapat diperhitungkan, disebut dengan *the hedonistic calculus* (Bentham dalam Bertens, 2007: 247-248). Tambahan dari idenya John Stuart Mill (1806-1873) tentang kualitas kebahagiaan yang dapat diukur secara empiris, yaitu kita harus berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam bidangnya. Kebahagiaan yang menjadi patokan norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali sebagai pelaku utama (Mill dalam Bertens, 2007: 249-250).

Penerapan etika ini, misalnya: kasus keberpihakan pemberitaan TV One, ANTV dan Metro TV pada kandidat, selama masa pencalonan Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2010 ini tidak akan terjadi, bila para jurnalisnya memegang etika utilitarisme. Mereka seharusnya berani memegang prinsip *the greatest happiness of the greatest number*, daripada patuh pada kepentingan politis pemodal media, meskipun nantinya ada kemungkinan sanksi pemecatan. Jurnalis harus yakin bahwa bersikap baik pasti ada hikmahnya, termasuk keyakinan memperoleh pekerjaan lagi, bila pemecatan benar-benar terjadi menimpanya.

Semua sistem etika diatas berorientasi pada tujuan perbuatan. Dalam utilitarisme, umpamanya, tujuan perbuatan moralnya yaitu memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, bisa dikatakan juga semua sistem itu bersifat teleologis.

## **Perspektif Etika Deontologi;**

Untuk deontologi merupakan sistem etika yang tidak menyoroti tujuan dari perbuatan atau keputusan kita, melainkan semata-mata berdasar pada wajib-tidaknya perbuatan dan keputusan kita. *Deon* berasal dari kata Yunani berarti apa yang harus dilakukan. Maka *deontology* dapat dimaknai 'teori tentang kewajiban.' Selain itu, deontologi menurut Immanuel Kant (1724-1804), arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Kehendak bisa menjadi baik, jika bertindak berdasarkan kewajiban. Kant menambahkan istilah legalitas, maknanya bertindak sesuai dengan kewajiban dan untuk memenuhi norma hukum. Suatu perbuatan bersifat moral jika dilakukan semata-mata karena 'hormat untuk hukum moral.'

Selain itu, Kant juga menyampaikan dua macam imperatif, meliputi: imperatif kategoris berarti perintah yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat sebelumnya. Untuk imperatif hipotetis ini akan selalu melibatkan sebuah syarat: "*kalau engkau ingin mencapai suatu tujuan, maka engkau harus menghendaki juga sarana-sarana yang menuju ke tujuan itu.*" Bila hukum moral harus dipahami sebagai imperatif kategoris, maka dalam bertindak secara moral kehendak harus otonom dan bukan heteronom.

Kehendak bersifat otonom bila menentukan dirinya sendiri. Bersifat heteronom jika membiarkan dirinya dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor luar (kecenderungan atau emosi) (Kant dalam Bertens, 2007: 254-257). Deontologi jurnalis ini membantu jurnalis dalam mempertajam makna tanggungjawab profesi (Haryatmoko, 2007: 46). Contohnya, individu-individu yang bekerja di stasiun

televisi TV One, ANTV dan Metro TV seharusnya menjalankan kewajiban jurnalistiknya, sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Seperti peraturan yang tercantum dalam Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Penafsirannya:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;
- b. Akurat berarti dipercaya benar, sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Bila pekerja media tersebut mempraktekkan kode etik ini, maka dapat diasumsikan juga kalau mereka telah menerapkan etika deontologi, sehingga kasus keberpihakan pemberitaan ketiga stasiun swasta nasional tersebut terhadap kandidat calon ketua umum Partai Golkar, tidak akan terjadi lagi dimasa yang akan datang. Kenyataannya, mereka melanggar etika ini, kemungkinan besar kasus serupa akan terulang lagi di masa depan. Pernyataan ini juga berlaku bagi jurnalis yang lain.

Sementara itu, pemikir bernama William David Ross (1877-1971) menerima pemikiran teori deontologi, namun ia menambahkan nuansa yang penting.

Kewajiban itu selalu merupakan kewajiban *prima facie* (pada pandangan pertama). Suatu kewajiban-untuk-sementara dan hanya berlaku sampai timbul kewajiban lebih penting lagi yang mengalahkan kewajiban yang pertama tadi. Sejumlah kewajiban *prima facie* William David Ross, meliputi:

- a. Kewajiban kesetiaan: kita harus menepati janji yang diadakan dengan bebas;
- b. Kewajiban ganti rugi: kita harus melunasi hutang moral dan hutang material;

kewajiban terima kasih: kita harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik terhadap kita;

- c. Kewajiban keadilan: kita harus membagikan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan jasa orang-orang bersangkutan;

kewajiban berbuat baik: kita harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita;

- d. Kewajiban mengembangkan dirinya: kita harus mengembangkan dan meningkatkan bakat kita di bidang keutamaan, intelegensi dan sebagainya;
- e. Kewajiban untuk tidak merugikan: kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (satu-satunya kewajiban yang dirumuskan Ross dalam bentuk negatif) (Ross dalam Bertens, 2007: 259-261).

Menjadi reporter atau praktisi media termasuk dalam kategori kewajiban mengembangkan dirinya. Menjadi reporter di stasiun televisi TV One, ANTV dan atau Metro TV merupakan wadah bagi mereka

mengembangkan potensi dirinya dibidang jurnalistik dan kewajiban melakukan tugas kantor. Hal ini termasuk kewajiban *prima facie*, tapi bila independensi dan kemerdekaan jurnalis dalam bahaya karena adanya intervensi konglomerat media, maka kewajiban itu harus diganti dengan kewajiban lain yang lebih penting yaitu berani menyatakan penolakan terhadap tekanan dan atau keluar dari tempat kerja mencari pekerjaan yang lebih baik.

### **Perspektif Etika Keutamaan**

Etika keutamaan mempunyai orientasi lain. Etika ini tidak begitu menyoroti perbuatan satu per satu, apakah sesuai atau tidak dengan norma moral, tetapi lebih memfokuskan pada manusia itu sendiri. Etika ini mempelajari keutamaan (*virtue*), artinya sifat yang dimiliki manusia. Etika keutamaan mengarahkan fokus perhatiannya pada *being* manusia, sementara etika kewajiban menekankan *doing* manusia. Etika keutamaan ingin menjawab sebuah pertanyaan: *What kind of person should I be?* (Saya harus menjadi orang yang bagaimana?). Untuk etika kewajiban memiliki pertanyaan pokok, yaitu *What should I do?* (Saya harus melakukan apa?).

Selain itu, etika kewajiban mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan moral yang berlaku untuk perbuatan kita. Bila terjadi konflik antara dua prinsip moral yang tidak dapat terpenuhi sekaligus, etika ini mencoba menentukan yang mana harus diberi prioritas. Etika kewajiban menilai benar salahnya kelakuan kita dengan berpegang pada norma dan prinsip moral saja. Etika kewajiban dan etika keutamaan ini saling melengkapi.

Etika kewajiban membutuhkan etika

keutamaan dan begitu sebaliknya, etika keutamaan membutuhkan etika kewajiban. Di bidang moral, usaha untuk mengikuti prinsip dan aturan tertentu kurang efisien, jika tidak disertai suatu sikap manusia untuk hidup menurut prinsip dan aturan moral tersebut. Ada alasan lain mengapa etika kewajiban membutuhkan etika keutamaan. Bila kita menaati prinsip dan norma moral, kita belum tentu menjadi manusia yang sungguh-sungguh baik secara moral.

Berpegang pada norma moral memang merupakan syarat bagi perilaku yang baik. Namun, membatasi diri pada norma saja belum cukup untuk dapat disebut sebagai orang yang baik dalam arti sesungguhnya. Etika keutamaan langsung bertujuan menjadikan manusia seperti pohon yang baik, sehingga tidak bisa lain perbuatannya harus baik juga. Sementara itu, ada jenis perbuatan yang melampaui kewajiban individu tetapi dinilai sangat terpuji bila dilakukan, sedangkan tidak ada orang yang akan dicela jika tidak melakukannya.

Dalam ilmu etika, tindakan ini disebut *super-erogatoris* (*supererogatory acts*), yakni perbuatan yang melebihi daripada apa-apa yang dituntut dalam dirinya. Oleh karena itu, muncul sosok yang dianggap kudus atau pahlawan, karena pihak yang bersangkutan memiliki kualitas moral yang sangat tinggi. Kudus dalam pengertian etis, terlepas dari konotasi religius, sementara sosok pahlawan dalam pemahaman tanpa maksud moral apapun. Keutamaan-keutamaan itu, meliputi: baik hati, terus terang, bernalar, ksatria, bersahabat, percaya diri, belas kasih, murah hati, penguasaan diri, sadar, jujur, disiplin diri, suka kerja sama, terampil, mandiri, berani, adil, bijaksana, santun, setia, berkepribadian, tunduk, ughari dan

toleransi.

Untuk filsuf peletak dasar pemikiran ini, diantaranya: Socrates, Plato dan Aristoteles (Bertens, 2007: 211-231). Sementara itu, bila etika keutamaan dikaitkan dengan topik diskusi ini, maka individu-individu yang bekerja di stasiun televisi TV One, ANTV dan Metro TV tidak menerapkan nilai atau keputusan etis di etika keutamaan, terbukti dari keberpihakan pemberitaan ketiga stasiun tersebut pada kandidat calon ketua umum Partai Golkar yang notabene masing-masing *owner* media itu sendiri.

### Penutup

Adanya prinsip yang seharusnya dipahami oleh pekerja media mengenai pekerjaannya dan kita sebagai konsumen ketika memilih media, yaitu wartawan/praktisi media mempunyai kewajiban terhadap nuraninya. Setiap praktisi media mulai dari tingkat redaksi hingga dewan direksi, seharusnya memiliki rasa etika dan tanggungjawab personal. Terlebih lagi, mereka mempunyai tanggungjawab untuk menyuarakan hati nuraninya dan mempersuasi jurnalis lain untuk melakukan hal yang serupa.

Mereka yang mengabdikan diri di organisasi harus diakui dan dihargai perbedaan pandangannya dengan pandangan redaktur, pemilik, pengiklan, konsumen media dan otoritas mapan (pemerintah), bila otonomi individualnya yang mengharuskan jurnalis berbuat begitu dengan *top management*. Agar hal ini bisa terwujud, keterbukaan dan kemerdekaan berekspresi di *news room* merupakan faktor penentu. Selain itu, diperlukan pula adanya kesanggupan dari para konglomerat media untuk membangun budaya yang isinya menghargai independensi pribadi pekerjanya.

Sementara itu, tidak ada satu sistem etika yang sama sekali memuaskan. Masing-masing memiliki kelemahan. Utilitarisme dan deontologi juga mengalami hal yang sama. Tidak ada utilitarisme dan deontologi murni. Hal ini tergantung dari sudut pandang etika yang dipakai peneliti, ketika dia ingin mengkaji suatu kasus permasalahan. Untuk kasus keberpihakan pemberitaan TV One, ANTV dan Metro TV pada kandidat, selama masa pencalonan ketua umum Partai Golkar ini, dapat disimpulkan bahwa para praktisi media tersebut telah melanggar etika deontologi, etika teleologi dan etika keutamaan.

### Daftar Pustaka

- Aristoteles. 2007. *The Nicomachean Ethics*. Dalam K. Bertens, Etika (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bentham, Jeremy. 2007. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Dalam K. Bertens, Etika (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. 2007. *Etika* (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Breed, Warren. 1996. *Social Control in the Newsroom*. Dalam A. David Gordon, John M. Kittross, Carol Reuss and John C. Merrill, *Controversies In Media Ethics*. New York: Longman Publishers USA.

- Dent, J.M. dan Sons. 2007. *An Essay Concerning Human Understanding*. Dalam K. Bertens, Etika (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gordon, A. David, John M. Kittross, Carol Reuss and John C. Merrill. 1996. *Controversies In Media Ethics*. New York: Longman Publishers USA.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi* (Cetakan Ke-5). Yogyakarta: Kanisius.
- Kant, Immanuel. 2007. *Kants Werke Akademie-Textausgabe*. Dalam K. Bertens, Etika (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2004. *Elemen-Elemen Jurnalisme, Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik* (Versi Terjemahan, Cetakan Kedua). Jakarta: Institut Studi Arus Informasi bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
- Lambeth, Edmund B. 1996. *Committed Journalism: An Ethic for the Profession*. Dalam A. David Gordon, John M. Kittross, Carol Reuss and John C. Merrill, *Controversies In Media Ethics*. New York: Longman Publishers USA.
- Mill, John Stuart. 2007. *Utilitarianism*. Dalam K. Bertens, Etika (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurudin. 2008. *Hubungan Media, Konsep dan Aplikasi* (Cetakan Pertama). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ross, William David. 2007. *The Right and The Good*. Dalam K. Bertens, Etika (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Weaver, David H. and G. Cleveland Wilhoit. 1996. *The American Journalist in the 1990s. Preliminary Report*. Dalam A. David Gordon, John M. Kittross, Carol Reuss and John C. Merrill, *Controversies In Media Ethics*. New York: Longman Publishers USA.
- <http://old.nabble.com/Re:%28Tv-one-vs-metro-tv%29pertarungan-dalam-golkar1-td25671828.html>
- [http://rol.republika.co.id/berita/79487/kpi\\_i\\_mbau\\_tv\\_tv\\_netral\\_siapkan\\_kandidat\\_munas\\_golkar](http://rol.republika.co.id/berita/79487/kpi_i_mbau_tv_tv_netral_siapkan_kandidat_munas_golkar)